

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH

KABUPATEN PEKALONGAN

3.1 Tinjauan Kebijakan Keruangan Wilayah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan tersebut harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (untuk jangka waktu 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (jangka waktu 5 tahun) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (untuk jangka waktu 1 tahun). Rencana jangka panjang pembangunan ditetapkan mulai tahun 2005 sampai 2025.

3.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRW Nasional, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Penyusunan RTRW harus mengacu pada RTRWN, pedoman bidang penataan ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tujuan dari adanya RTRW Provinsi yaitu sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Provinsi, sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. RTRW Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009 – 2029, memiliki kebijakan dan strategi sesuai dengan

kondisi kebutuhan dan penataan ruang di Provinsi Jawa Tengah. Dalam kebijakan pengembangan struktur ruang, Provinsi Jawa Tengah fokus terhadap peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan, peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi. Strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan dilakukan dengan upaya memperlakukan sistem perdesaan sebagai kontinum dengan sistem perkotaan dalam kerangka sistem perwilayahan pembangunan Provinsi.

Selain itu dalam strategi terdapat arahan untuk mengembangkan sektor-sektor primer perdesaan melalui upaya peningkatan produktifitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan, mengembangkan kegiatan non-pertanian perdesaan dengan pendekatan komprehensif melalui pengembangan produksi dan pengembangan pemasaran, melengkapi kawasan perdesaan dengan prasarana dan sarana, baik yang bersifat umum, sosial, lingkungan dan ekonomi, mengembangkan sistem pusat perdesaan yang terstruktur dengan baik yang mampu meningkatkan keterhubungan kawasan perdesaan dengan pusat-pusat kawasan perkotaan. Dalam pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki kebijakan dan strategi sesuai dengan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2010 pasal 7 yaitu pengembangan kawasan budidaya dan kawasan lindung.

Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk mewujudkan dan meningkatkan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya yang direncanakan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2010 pasal 9 meliputi upaya menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis Provinsi untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah, mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya, mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan/atau nasional.

Pengembangan dan pelestarian kawasan budidaya hutan produksi, perkebunan, peternakan untuk mewujudkan nilai tambah daerah dan/atau nasional, mengembangkan dan melestarikan kawasan peruntukan industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah dan/atau nasional, mengembangkan kawasan pesisir dan pulau-pulau

kecil untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi pada sektor perikanan dan pariwisata. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman. Rencana Struktur Ruang Provinsi Jawa Tengah yang dimuat dalam Peraturan Daerah No.6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009 – 2029 adalah merumuskan PKN, PKW, PKL sebagai sistem perkotaan. Pada sistem perwilayahan atau kawasan, Provinsi Jawa Tengah merumuskan 8 kawasan strategis, yaitu:

- Kedungsepur yang meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang (Ungaran), Kota Semarang, Kota Salatiga dan 29 Kabupaten Grobogan (Purwodadi), dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, Nasional dan Internasional
- Juwana-Jepara-Kudus-Pati (Wanarakuti) yang berpusat di Kudus, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional
- Surakarta dan sekitarnya (Subosukawonosraten), yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, Nasional dan Internasional
- Bregasmalang, yaitu Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Slawi (Kabupaten Tegal), dan Kabupaten Pemalang, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional
- Petanglong yang terdiri dari Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi
- Barlingmascakeb, meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional (khusus Cilacap)
- Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi
- Banglor yang terdiri dari Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora, dengan pusat di Cepu, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi.

3.1.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 – 2029

PKL terletak di Kecamatan Kajen dan Kecamatan Wiradesa mempunyai fungsi pusat pemerintahan kabupaten, pusat permukiman, pusat pendidikan, pusat pelayanan sosial dan ekonomi skala kabupaten, pusat transportasi wilayah, pengembangan pariwisata, pusat

pengembangan permukiman perkotaan, pusat perdagangan dan jasa, industri besar, menengah, kecil dan mikro serta pengembangan pertanian tanaman pangan. Sedangkan PKLp Kabupaten Pekalongan terletak di Kecamatan Kedungwuni mempunyai fungsi pusat pemerintahan skala kecamatan, pengembangan pelayanan sosial dan ekonomi, pengembangan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, pengembangan pusat transportasi, pengembangan kawasan pendidikan dan pengembangan kegiatan industri besar, menengah, kecil dan mikro. Fungsi pelayanan lain di Kabupaten Pekalongan adalah PPK yang terletak di Kecamatan Doro dan Kecamatan Sragi, fungsinya yaitu sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan, pengembangan pelayanan social dan ekonomi, pengembangan permukiman, pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, pengembangan tanaman perkebunan dan hortikultura, pengembangan tanaman pangan, pengembangan kegiatan wisata air dan pemancingan, pengembangan tanaman hutan rakyat, pengembangan agroindustri, pusat kegiatan transportasi, pengembangan industri menengah, kecil dan mikro.

Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pengembangan hirarki pelayanan III atau PPI\ (Pusat Pelayanan Lingkungan) diarahkan untuk mengembangkan posisi pusat perdesaan yang berfungsi selain pusat pelayanan perdesaan yaitu sebagai pusat produksi hasil pertanian dan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL kawasan perdesaan Kabupaten Pekalongan tersebar di beberapa kecamatan membentuk kawasan perkotaan dalam perdesaan, desa-desa tersebut antara lain :

- Desa Legokkalong Kecamatan Karanganyar,
- Desa Siwalan Kecamatan Siwalan,
- Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto,
- Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi,
- Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong,
- Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran,
- Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo,
- Desa Pacar Kecamatan Tirto,
- Desa Kalirejo Kecamatan Talun,
- Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap,
- Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran,
- Desa Kandangserang Kecamatan Kandangserang,

- Desa Yosorejo Kecamatan Petungkriyono
- dan Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang

Pusat pelayanan perdesaan yang secara berhirarki tersebut memiliki pengembangan tiap-tiap kawasan perdesaannya. Adapun pengembangan kawasan perdesaan (PPL) Kabupaten Pekalongan antara lain :

- a) pengembangan perdesaan berbasis potensi dasar yang dimiliki;
- b) pengembangan perdesaan sebagai kawasan pengembangan agropolitan;
- c) pengembangan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhirarki; pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- d) mempertahankan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
- e) konservasi sumber daya alam;
- f) pelestarian warisan budaya lokal;
- g) mempertahankan kawasan LP2B untuk ketahanan pangan; dan
- h) menjaga keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

3.2 Aspek Fisik Wilayah

Kondisi fisik ataupun karakteristik fisik alam merupakan suatu keadaan alamiah suatu wilayah yang meliputi batas administratif, klmatologi, topografi, litologi, hidrogeologi serta rawan bencana. Cara mengetahui kondisi fisik dan bahaya geologi suatu wilayah diperlukan adanya suatu analisis. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi fisik dan permasalahan geologi ialah menggunakan cara skoring dan *weighted overlay sum*. Skoring atau pemberian nilai merupakan parameter yang sering digunakan dalam analisis. Tujuan dilakukannya sistem skoring adalah untuk menentukan kriteria fungsi dari suatu wilayah dengan ketentuan penetapan kawasan lindung dan budidaya yaitu SK Menteri Kehutanan No.873/UM/ II/ 1980 dan No. 683 KPTS / UM / 1981.

3.2.1.1 Curah Hujan (Klimatologi)

Curah Hujan merupakan aspek yang menjelaskan mengenai intensitas curah hujan yang ada pada suatu wilayah. Untuk menentukan kondisi curah hujan disuatu wilayah, digunakanlah teknik skoring yang berpedoman pada kriteria yang ada pada SK Menteri Kehutanan No. 873 / UM / II / 1980. Pada wilayah Kabupaten Pekalongan intensitas hujan sangatlah beragam, terdapat intensitas rendah(wilayah utara) hingga cukup tinggi (wilayah selatan) Pada Kabupaten Pekalongan wilayah bagian utara (Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Siwalan,

Kecamatan Wiradesaa, Kecamatan Tirta, Kecamatan Buaran, dan Kecamatan Sragi) memiliki intensitas hujan rendah yaitu sebesar 1750 – 2750 mm/tahun, maknanya ketika hujan dikumpulkan dalam satu tahun maka akan setinggi 1,7 – 2,7 meter.

3.2.1.2 Kelerengan (Geologi)

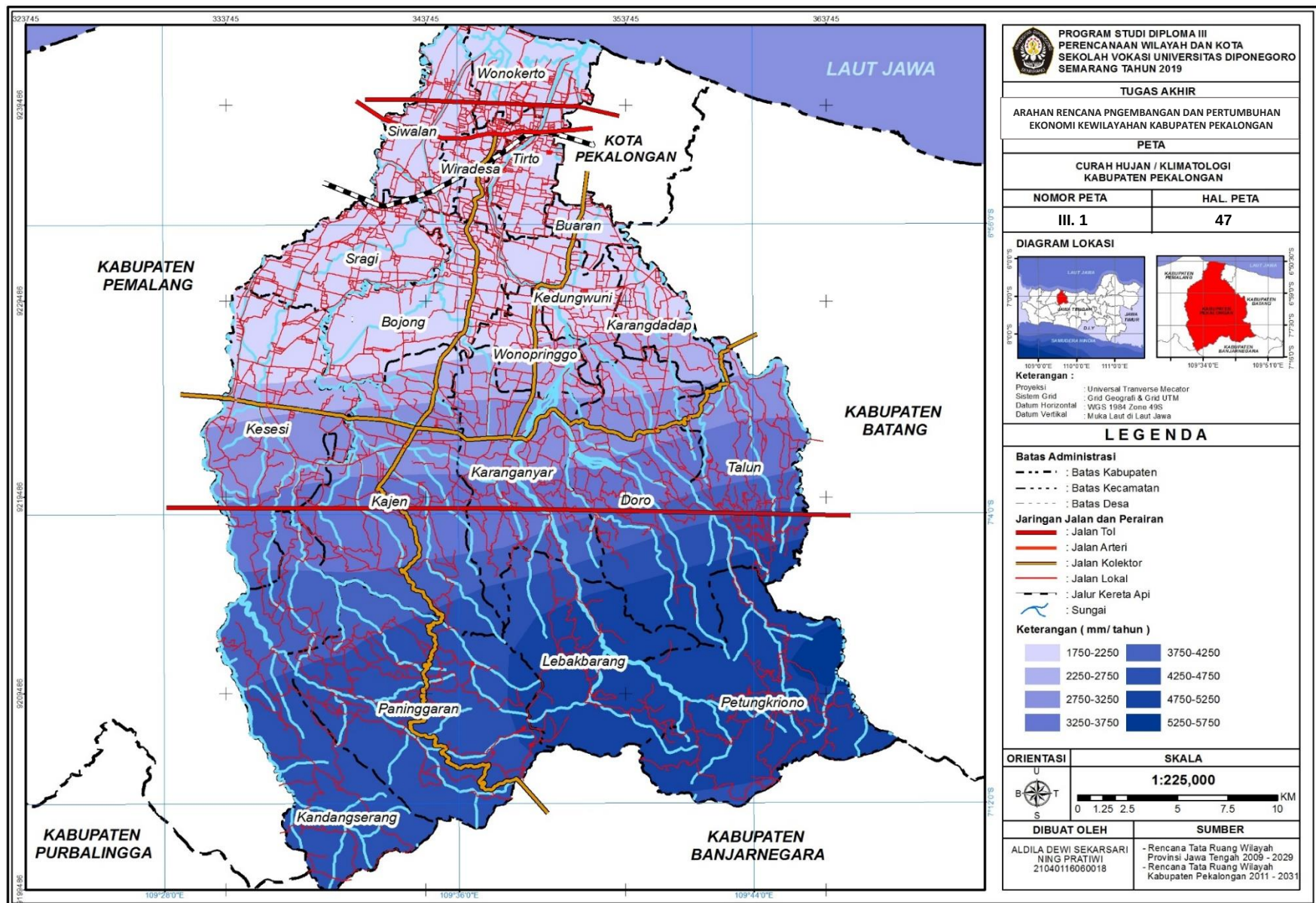
Kemiringan lereng atau yang biasa disebut kelerengan adalah sudut yang dibentuk oleh perbedaan tinggi permukaan lahan (relief), yaitu antara bidang datar tanah dengan bidang horizontal dan pada umumnya dihitung dalam persen (%) atau derajat (°). Kecuraman lereng, panjang lereng dan bentuk lereng semuanya akan mempengaruhi besarnya erosi dan aliran permukaan. Untuk menentukan kondisi kelerengan disuatu wilayah, digunakanlah teknik skoring yang berpedoman pada kriteria yang ada pada SK Menteri Kehutanan No. 873 / UM / II / 1980.

Tabel III. 1
Pembobotan / Skoring Kelas Lereng

Kelas Lereng	Kelerengan	Keterangan	Skor
1	0 – 8 %	Datar	20
2	8 – 15 %	Landai	40
3	15 – 25 %	Agak Curam	60
4	25 – 45 %	Curam	80
5	45 % atau lebih	Sangat Curam	100

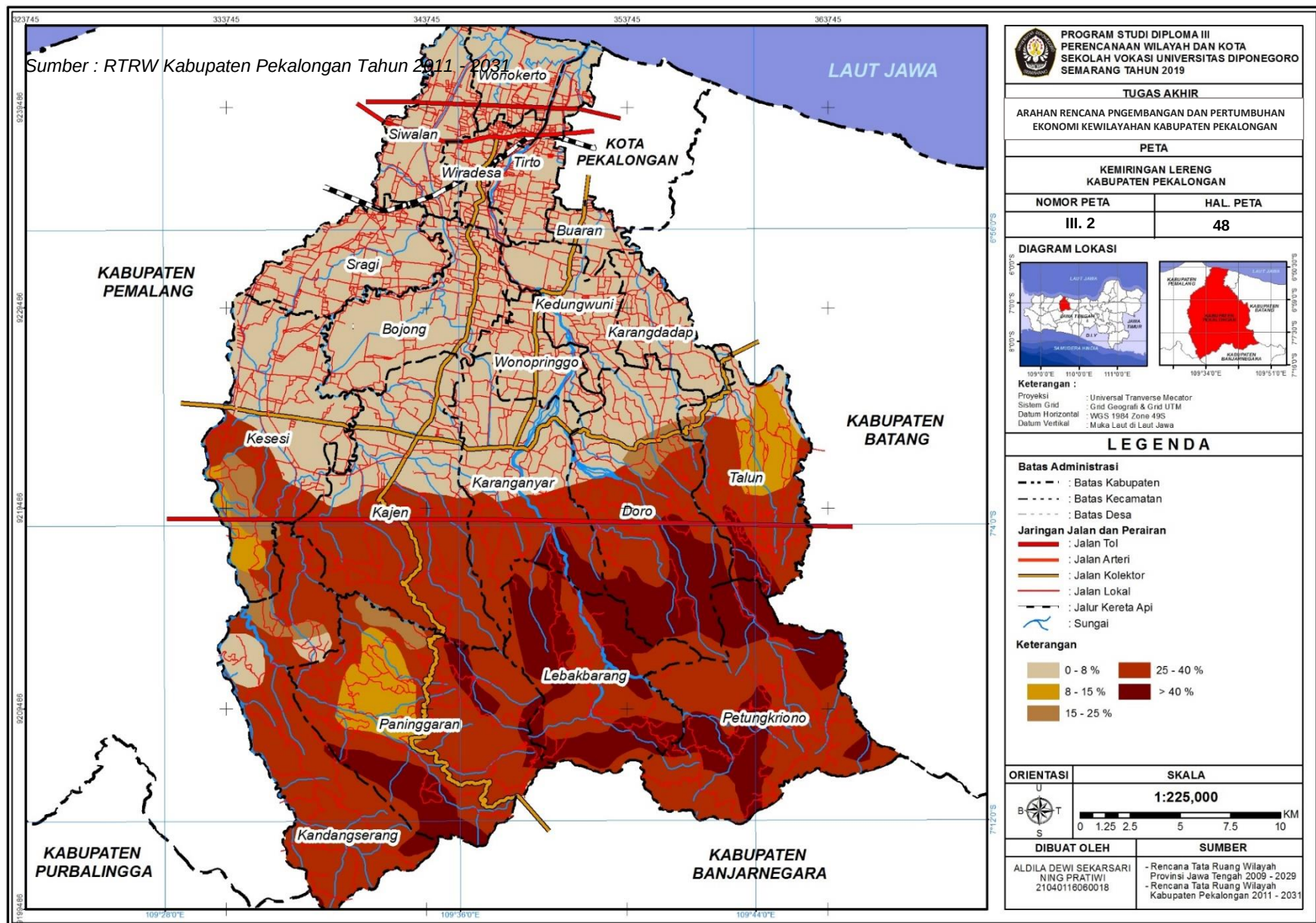
Sumber: SK Menteri Kehutanan No. 873 / UM / II / 1980

Berdasarkan topografi wilayah Kabupaten Pekalongan, memiliki kemiringan lereng yang beragam, dari datar hingga sangat curam . Lereng yang bersifat datar pada wilayah Kabupaten Pekalongan dominan disisi utara wilayah Kabupaten Pekalongan karena lokasinya yang berbatasan dengan Laut Jawa, sedangkan kelerengan yang bersifat curam dengan kisaran 25 – 45% bahkan >45 % berada di sisi selatan karena topografinya sebagai lereng Gunung Ragajambangan.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2031

Peta III. 1 Curah Hujan/ Klimatologi Kabupaten Pekalongan



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2031

Peta III. 2 Kemiringan Lereng Kabupaten Pekalongan

3.2.1.3 Jenis Tanah (Pedologi)

Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lanjut, karena perubahan alami dibawah pengaruh air, udara, dan macam - macam organisme baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Tingkat perubahan terlihat pada komposisi, struktur dan warna hasil pelapukan (Dokuchaev 1870). Dapat diambil kesimpulan bahwa jenis tanah memiliki arti sebuah jenis atau macam dari lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses pengolahan lanjut. Untuk menentukan kondisi jenis tanah disuatu wilayah, digunakanlah teknik skoring yang berpedoman pada kriteria yang ada pada SK Menteri Kehutanan No. 873 / UM / II / 1980.

abel III. 2 Kriteria Jenis Tanah

Kelas Tanah	Jenis Tanah	Ket.	Skor
1	Aluvial, Glei, Tanosol, Hidromorf Kelabu, Literit Air Tanah	Tidak Peka	15
2	Latosol	Agak Peka	30
3	Brown Forest Soil, Non Calcic Brown	Kurang Peka	45
4	Andosol, Laterit, Grumosol, Podsol, Podsolik	Peka	60
5	Regosol, Litosol, Organosol, Renzina	Sangat Peka	75

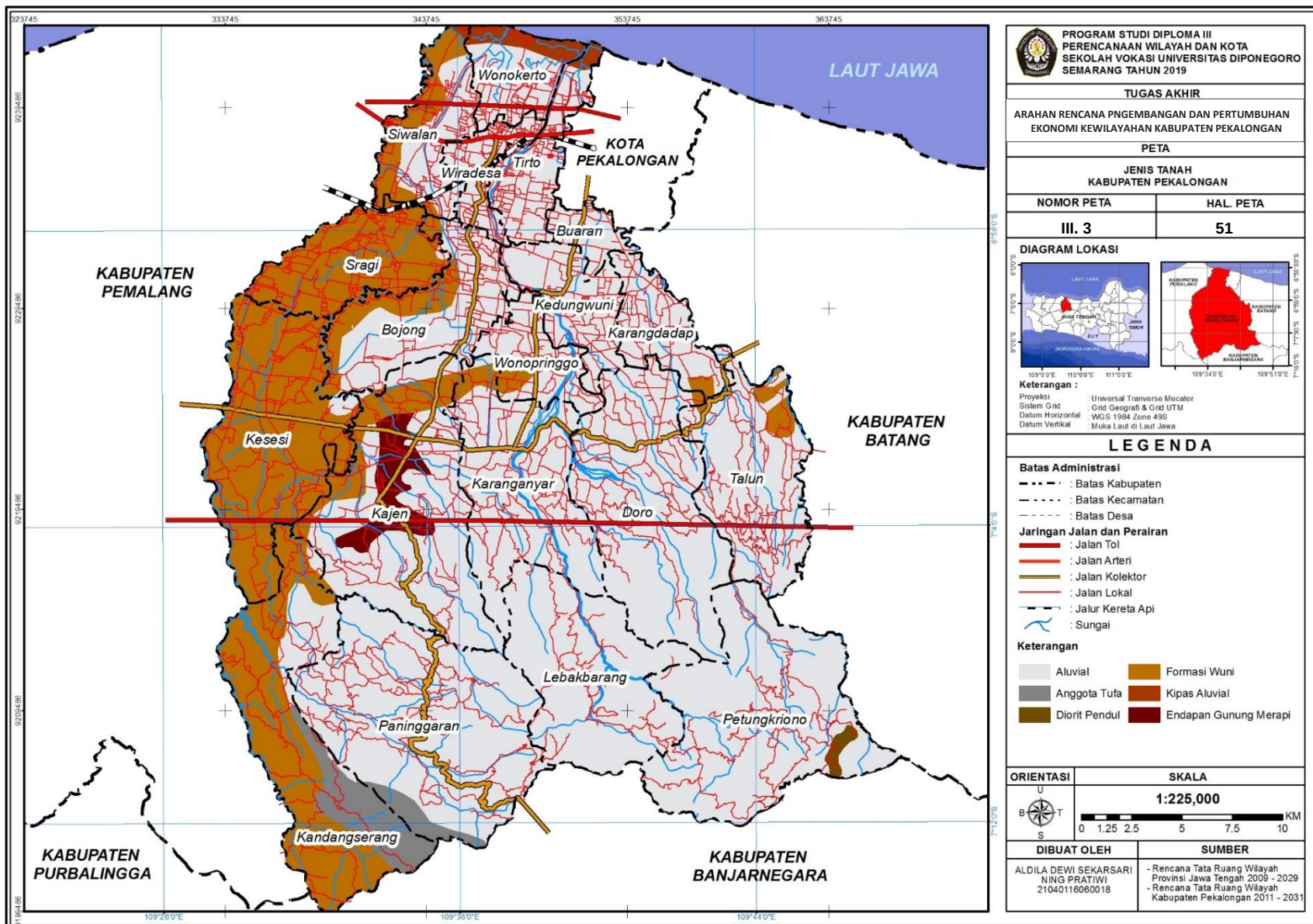
Sumber: SK Menteri Kehutanan No. 873 / UM / II / 1980.

Berdasarkan data jenis tanah wilayah Kabupaten Pekalongan terdapat 6 jenis klasifikasi tanah, yaitu alluvial, endapan gunung merapi tua, tuffa (jenis grumusol), diorite pendul (jenis batuan beku), kipas alluvial (Alluvium), dan formasi wuni (dominasi latosol). Rata-rata jenis tanah wilayah Kabupaten Pekalongan seluas adalah jenis alluvial. Tanah ini sangat cocok untuk pertanian baik pertanian padi maupun palawija seperti jagung, tembakau dan jenis tanaman lainnya. Selain alluvial, jenis tanah yang dominan pada wilayah Kabupaten Pekalongan adalah jenis tanah latosol (batuan formasi wuni dan diorite pendul) merupakan salah satu jenis tanah yang terjadi karena adanya batuan batuan beku yang berasal dari gunung berapi selain dari gunung berapi tanah inipun terjadi karena adanya sedimen yang cukup keras yang mengalami proses pelapukan, yaitu proses pelapukan kimia yang terjadi dengan adanya organisme hidup sebagai bahan untuk membantu merancang pelapukan batuan sedimen tersebut.

Jenis tanah latosol pada Kabupaten Pekalongan berada di Kecamatan Sragi, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Kendang serang, Kecamatan Siwalan, dan Kecamatan Kajen. Pemanfaatan pada jenis tanah latosol cocok untuk lahan perkebunan maupun permukiman. Lahan perkebunan yang cocok adalah untuk tanaman jagung, tebu, coklat, pala, vanili, dan tanaman kebun lainnya. Selain jenis tanah alluvial dan latosol, wilayah Kabupaten Pekalongan juga terdapat jenis grumusol (dari batuan tuffa) yang memiliki kerentanan yang cukup tinggi/peka terhadap gerakan tanah. Jenis tanah ini dapat dijumpai di Kecamatan Kandangserang dan Kecamatan Paninggaran. Tanah grumusol merupakan tanah yang terbentuk dari batuan induk kapur dan tuffa vulkanik yang umumnya bersifat basa sehingga tidak ada aktivitas organik didalamnya. Hal inilah yang menjadikan tanah ini sangat miskin hara dan unsur organik lainnya. Sifat kapur itu sendiri yaitu dapat menyerap semua unsur hara di tanah sehingga kadar kapur yang tinggi dapat menjadi racun bagi tumbuhan. Pemanfaatan tanah gromosol pada musim hujan, grumusol dapat ditanami padi dan ketika musim kemarau lebih cocok ditanam palawija ataupun singkong, dengan catatan jika tidak ada sistem irigasi.

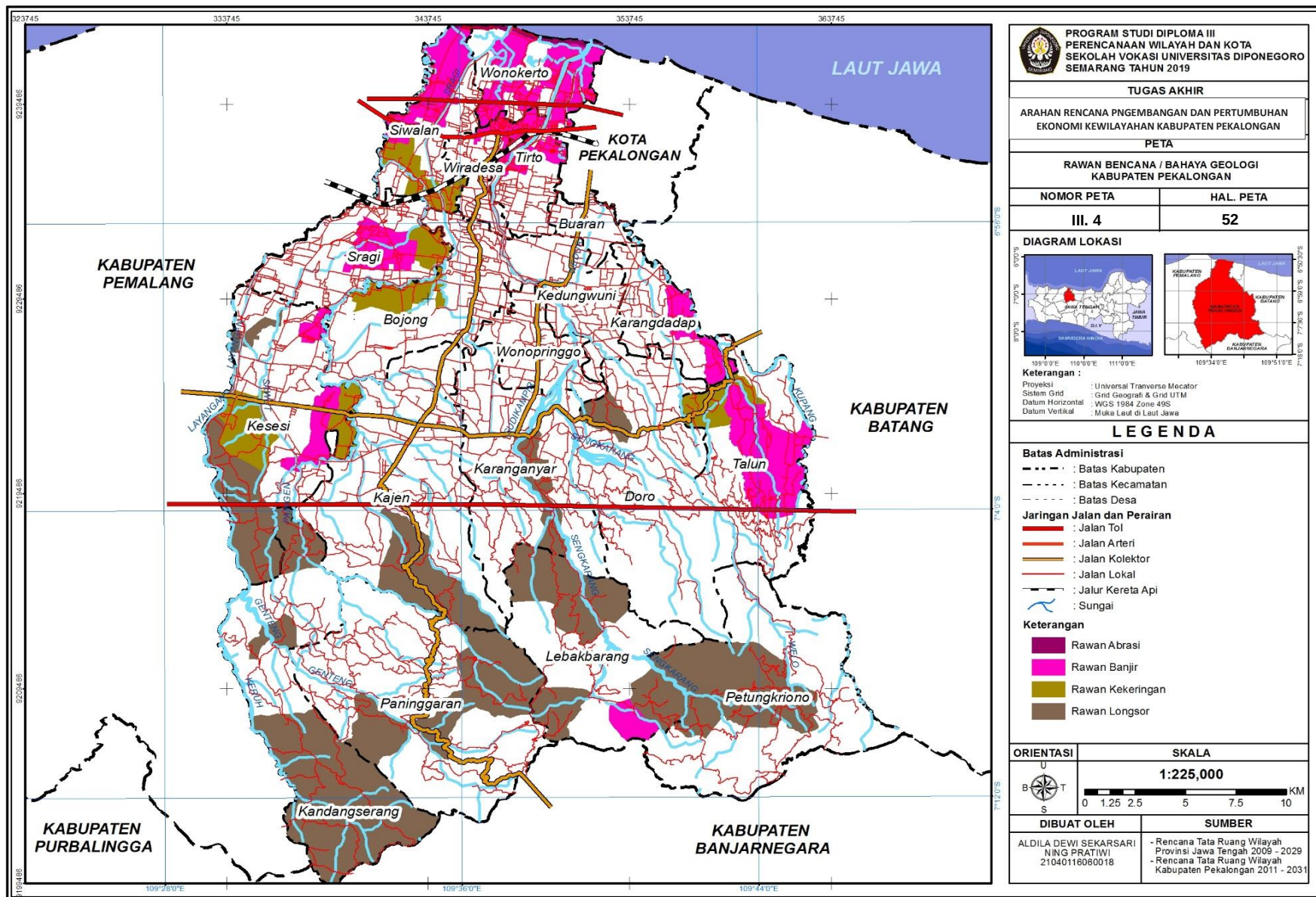
3.2.1.4 Rawan Bencana

Menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Rawan Bencana adalah Kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Berdasarkan topografi maupun jenis tanah, wilayah Kabupaten Pekalongan sangatlah beragam dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Hal tersebut tidak memungkinkan bahwa bencana yang berada pada wilayah Kabupaten Pekalongan juga beragam yaitu, banjir, tanah longsor hingga kekeringan. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Pekalongan menyatakan bahwa berdasarkan pemetaan bencana yang dilakukan terdapat 12 kecamatan dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan yang tercatat sebagai daerah rawan akan bencana banjir ataupun rawan terhadap bencana longsor.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2031

Peta III. 3 Jenis Tanah Kabupaten Pekalongan



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2031

Peta III. 4 Rawan Bencana / Bahaya Geologi Kabupaten Pekalongan

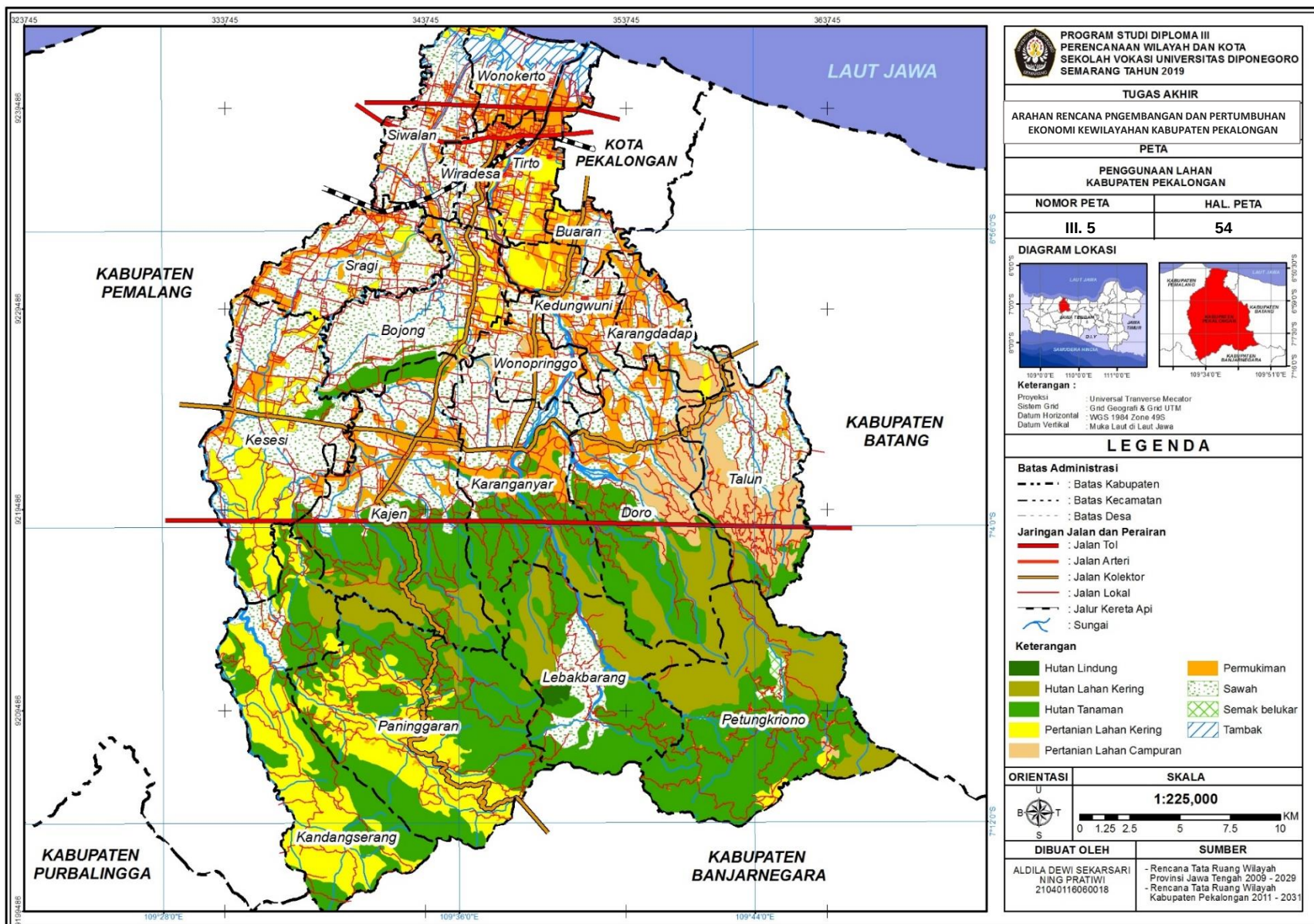
3.2.2 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan dapat diartikan sebagai aktivitas manusia terhadap lahan baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat merubah suatu fungsi lahan tersebut. Luas lahan sebesar 83615 Ha atau 836,15 Km² memiliki perbandingan lahan pertanian dan hutan yang seimbang. Berdasarkan bentuk bentang lahan Kabupaten Pekalongan yang sedikit memiliki lahan perairan (maritime) namun juga memiliki daerah dataran tinggi . Berdasarkan data penggunaan lahan dan perubahannya dari tahun 2016 hingga tahun 2017, tidak berubah cepat dalam perubahan lahan sawah menjadi lahan bukan sawah. Rata-rata perubahan lahan dari tahun 2016 hingga tahun 2017 di tiap-tiap kecamatan adalah 0.0298 % dari luas wilayah Kabupaten Pekalongan. Namun perubahan yang terlihat berada di Kecamatan Kesesi seluas 300 Ha dan Kecamatan Lebakbarang sebesar 70 Ha menjadi lahan bukan sawah. Adapun data penggunaan lahan Kabupaten Pekalongan tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut,

Tabel III. 3
Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2017

Kecamatan	Tahun 2016		Tahun 2017	
	Lahan Sawah (Ha)	Bukan Lahan Sawah (Ha)	Lahan Sawah (Ha)	Bukan Lahan Sawah (Ha)
Kandangserang	1750.00	4217.00	1750.00	4305.00
Paninggaran	1340.00	7959.00	1340.00	7960.00
Lebakbarang	533.00	5287.00	463.00	5357.00
Petungkriyono	216.00	7133.00	216.00	7142.00
Talun	1378.00	4479.00	1378.00	4479.00
Doro	1600.00	5207.00	1600.00	5245.00
Karanganyar	1753.00	4549.00	1753.00	4597.00
Kajen	2273.00	5242.00	2273.00	5242.00
Kesesi	3531.00	3320.00	3222.00	3629.00
Sragi	2182.00	1004.00	2152.00	1089.00
Siwalan	1518.00	903.00	1518.00	1073.00
Bojong	2189.00	1816.00	2178.00	1827.00
Wonopringgo	586.00	1201.00	526.00	1354.00
Kedungwuni	787.00	1506.00	786.00	1507.00
Karangdadap	1095.00	1005.00	1101.00	999.00
Buaran	337.00	595.00	337.00	617.00
Tirto	393.00	1346.00	393.00	1346.00
Wiradesa	467.00	803.00	467.00	803.00
Wonokerto	453.00	1065.00	453.00	1138.00

Sumber : Data BPS, 2018



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2031
 Peta III. 5 Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan

3.2.3 Kependudukan / *Demography*

Demografi adalah studi tentang penduduk khususnya mengenai kelahiran, perkawinan, kematian dan perpindahan. Studi ini menyangkut jumlah, persebaran geografis, komposisi penduduk dan perubahannya dari waktu ke waktu. Karakteristik demografi adalah ciri yang menggambarkan perbedaan masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, suku bangsa, pendapatan, jenis keluarga, status pernikahan, lokasi geografi.

3.2.3.1 Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Komposisi penduduk yang dibahas dalam laporan ini meliputi jumlah penduduk menurut umur, jumlah penduduk menurut agama, jumlah penduduk menurut mata pencaharian, dan menurut tingkat pendidikan. Dengan adanya pertumbuhan dari berbagai aspek tersebut maka sistem mata pencaharian masyarakat tersebut akan bertambah dari homogen menjadi kompleks.

1) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk merupakan salah satu komponen yang akan dibahas dalam karakteristik kependudukan dalam laporan ini. Dengan adanya data jumlah penduduk tersebut bertujuan untuk menentukan rasio perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan khususnya pada wilayah Pekalongan. Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan bergerak lurus dengan luas wilayahnya. Berdasarkan data kependudukan jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan berjumlah 886.197 jiwa. Sebaran penduduk terbesar berada di Kecamatan Kedungwuni yaitu sejumlah 98.833 jiwa dengan 49.327 jiwa penduduk laki-laki dan 9506 jiwa penduduk perempuan. Dari 19 kecamatan yang berada di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Lebakbarang memiliki jumlah penduduk terendah sebanyak 10.508 jiwa penduduk yang tinggal. Rata-rata perbandingan antara jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan dapat dikatakan seimbang karena nilai sex ratio mendekati 100.

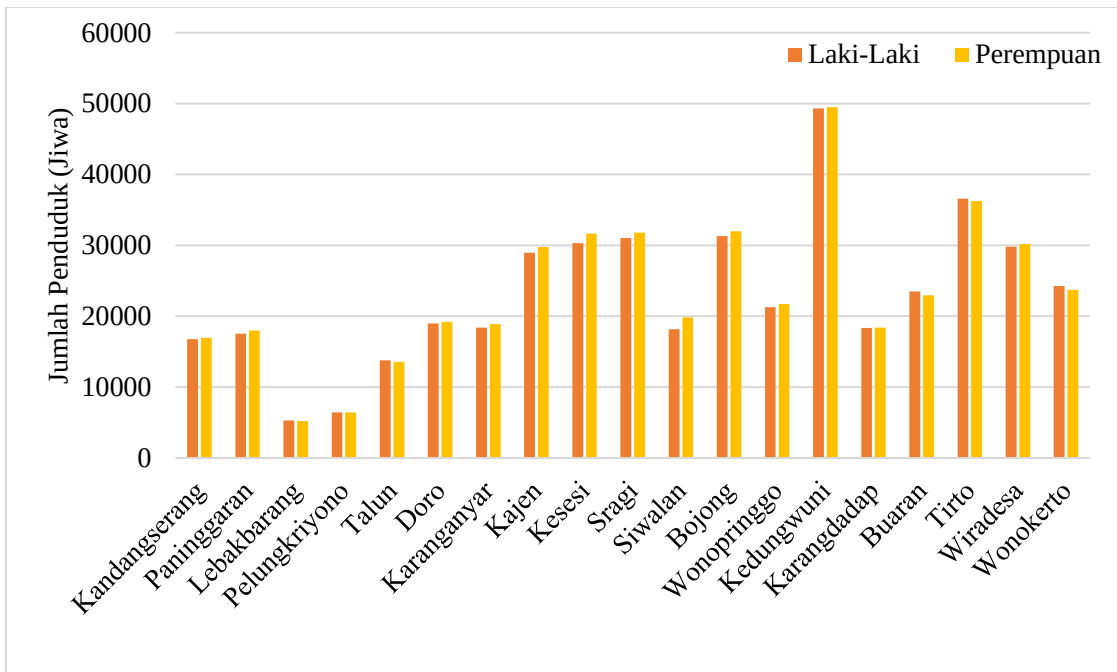
Tabel III. 4
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pekalongan

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Kandangserang	16783	16959	33742	99
2	Paninggaran	17539	18006	35545	97
3	Lebakbarang	5309	5199	10508	102
4	Pelungkriyono	6441	6412	12853	100
5	Talun	13777	13541	27318	102

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan		
6	Doro	18995	19210	38205	99
7	Karanganyar	18411	18902	37313	97
8	Kajen	28963	29771	58734	97
9	Kesesi	30306	31647	61953	96
10	Sragi	31030	31800	62830	98
11	Siwalan	18179	19840	38019	92
12	Bojong	31312	31973	63285	98
13	Wonopringgo	21298	21720	43018	98
14	Kedungwuni	49327	49506	98833	100
15	Karangdadap	18339	18398	36737	100
16	Buaran	23493	22933	46426	102
17	Tirto	36605	36273	72878	101
18	Wiradesa	29832	30187	60019	99
19	Wonokerto	24268	23713	47981	102
	Jumlah	440207	445990	886197	99

Sumber : Data BPS Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2018

Berdasarkan tabel III.4 dapat ditemukan perbandingan nilai sex ratio tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Dari nilai sex ratio tersebut, perbedaan tiap-tiap kecamatan dapat dikatakan relative stabil karena jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan cukup seimbang. Nilai sex ratio tertinggi berjumlah 102 yaitu berada di Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Buaran dan Kecamatan Talun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap terdapat 100 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan maka terdapat 102 jiwa penduduk laki-laki. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa ketiga kecamatan tersebut (Kecamatan Lebakbarang, Buaran dan Talun) memiliki pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki yang lebih dominan dibandingkan perempuan. Namun Kecamatan Siwalan yang tidak memiliki jumlah penduduk terendah namun memiliki nilai sex ratio terkecil yaitu jumlah penduduk laki-laki berjumlah 92 jiwa jika terdapat 100 jiwa penduduk perempuan. Namun dilihat secara keseluruhan dari 19 kecamatan yang berada di Kabupaten Pekalongan dapat dikatakan bahwa perbandingan laki-laki dengan perempuan adalah 1 : 0.99 karena terdapat 99 jiwa penduduk laki-laki jika terdapat 100 jiwa penduduk perempuan di Kabupaten Pekalongan..



Gambar 3. 1
Grafik Perbandingan Sex Ratio Kabupaten Pekalongan Tahun 2018

Sumber : Data BPS Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2018

2) Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

Jumlah penduduk menurut kelompok umur digunakan untuk mengetahui struktur penduduk dan angka ketergantungan di suatu wilayah. Berdasarkan data kependudukan jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan berjumlah 886.197 jiwa. Sebaran penduduk terbesar berada di Kecamatan Kedungwuni yaitu sejumlah 98.833 jiwa dengan 49.327 jiwa penduduk laki-laki dan 9.506 jiwa penduduk perempuan. Struktur penduduk di Kabupaten Pekalongan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu usia muda terdiri dari kelompok umur usia 0-14 tahun, usia produktif yang terdiri dari kelompok umur usia 15-64 tahun dan usia tua yang terdiri dari kelompok umur usia 65-75+. Pada kelompok usia muda (0-14 tahun) penduduk tergolong tinggi jumlahnya pada usia muda 10 – 14 tahun dengan jumlah penduduk sebesar 41.979 jiwa laki-laki dan 40.361 jiwa penduduk perempuan. Namun secara keseluruhan dari jumlah penduduk di Kabupaten Pekalongan usia produktif adalah usia dengan jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Pekalongan. Penduduk pada usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Pekalongan sebesar 592.343 jiwa penduduk.

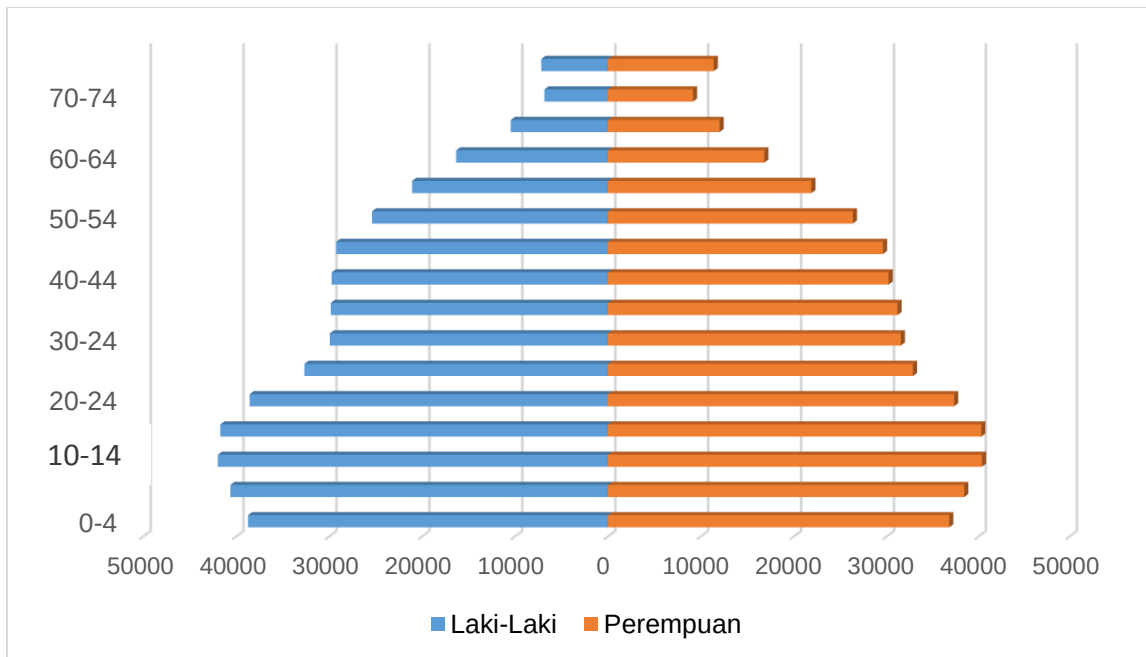
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kabupaten Pekalongan memiliki sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan wilayah sekitar dikarenakan memiliki angka usia produktif sebesar 66,84% dari jumlah penduduk secara keseluruhan.

Tabel III. 5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Pekalongan

Kelompok Umur (tahun)	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Total (jiwa)
0-4	38.733	36.772	75.505
5-9	40.628	38.407	79.035
10-14	41.979	40.361	82.340
15-19	41.704	40.289	81.993
20-24	38.547	37.303	75.850
25-29	32.657	32.814	65.471
30-34	29.926	31.511	61.437
35-39	29.819	31.157	60.976
40-44	29.729	30.194	59.923
45-49	29.250	29.587	58.837
50-54	25.383	26.358	51.741
55-59	21.071	21.888	42.959
60-64	16.333	16.823	33.156
65-69	10.455	12.005	22.460
70-74	6.831	9.149	15.980
75 +	7.162	11.372	18.534
Jumlah	440.207	445.990	886.197

Sumber : Data BPS Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2018.

Struktur penduduk digambarkan dalam bentuk jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin yang dibuat dengan grafik piramida penduduk. Piramida penduduk adalah grafik yang menyajikan data penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin dan daerah suatu penduduk. Berdasarkan analisa data, bentuk piramida penduduk Kabupaten Pekalongan adalah piramida muda atau biasa disebut piramida *expansive*. Pada piramida (Gambar 3.2) menjelaskan bahwa tingkat kelahiran / fertilitas tinggi namun angka kematian rendah sehingga karakteristik penduduk pada kelompok usia muda lebih besar jumlahnya, pertumbuhan penduduk tergolong cepat karena tidak mendekati angka 0 dan angka kematian tergolong rendah.



Gambar 3. 2
Piramida Penduduk Kabupaten Pekalongan

Sumber : Data BPS Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2018

3) Angka Ketergantungan

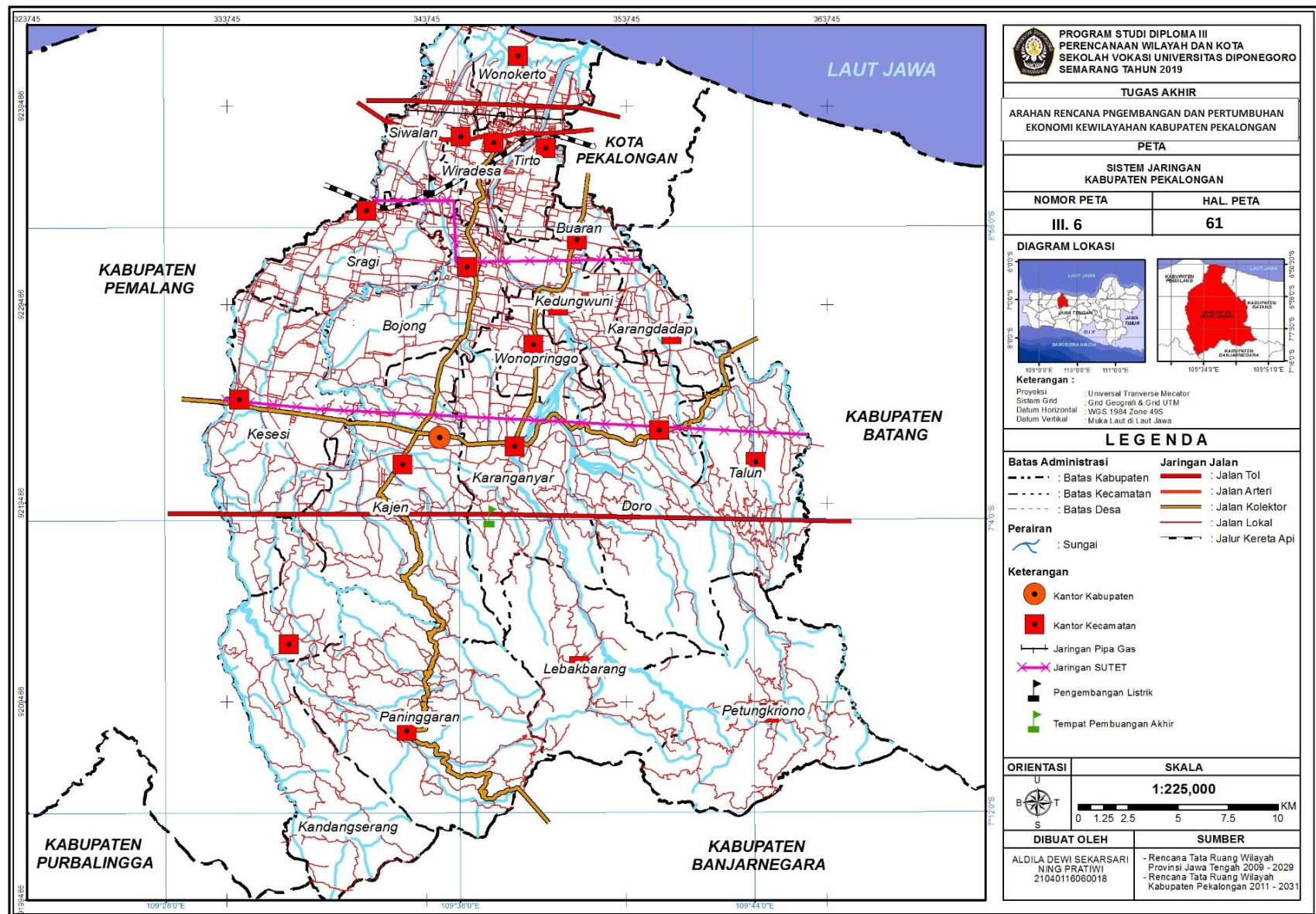
Angka ketergantungan merupakan suatu angka yang menunjukkan besarnya beban penduduk usia non produktif (bukan tenaga kerja) yang harus ditanggung oleh seorang penduduk produktif (tenaga kerja). Semakin tinggi angka ketergantungan penduduk suatu daerah, maka semakin berat beban penduduknya. Pergeseran struktur usia muda ke usia tua produktif akan membawa konsekuensi peningkatan pelayanan pendidikan terutama pendidikan tinggi dan kesempatan kerja. Sedangkan pergeseran struktur umur produktif ke usia tua pada akhirnya akan mempunyai dampak terhadap persoalan penyantunan penduduk usia lanjut. Bersamaan dengan perubahan sosial ekonomi diperkirakan akan terjadi pergeseran pola penyantunan usia lanjut dari keluarga ke institusi. Apabila keadaan ini terjadi, maka tanggung jawab pemerintah akan menjadi bertambah berat (Kasto dalam Prijono, 1995). Dengan adanya data penduduk usia produktif dan non produktif maka perlu diperhitungkan angka ketergantungannya. Adapun perhitungan angka ketergantungan di Kabupaten Pekalongan sebagai berikut,

$$\begin{aligned}
 \text{Angka Ketergantungan} &= \left(\frac{\sum \text{Penduduk Non Produktif}}{\sum \text{Penduduk Produktif}} \right) \times 100 \\
 &= \left(\frac{\text{Usia 0-14 tahun} + \text{Usia} > 64 \text{ tahun}}{\text{Usia 15-64}} \right) \times 100 \\
 &= \left(\frac{236.880 + 592.343}{56.974 \text{ jiwa}} \right) \times 100 = \mathbf{14,55 \%}
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Pekalongan menghasilkan nilai sebesar 14,55 %. Hal tersebut memiliki makna bahwa setiap 100 jiwa penduduk yang tergolong usia produktif yang ada di Kabupaten Pekalongan maka terdapat 15 jiwa penduduk sebagai tanggungan usia tidak produktif.

3.2.4 Sistem Jaringan

Sistem utilitas atau biasa disebut prasarana merupakan fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan sosial dan ekonomi. Sistem jaringan yang terdapat pada Kabupaten Pekalongan tergolong dalam daerah berkembang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kondisi Kabupaten Pekalongan yang dilalui jaringan jalan bebas hambatan (Jalan Tol Semarang – Pemalang), jaringan pipa gas maupun jaringan sutet yang menghubungkan wilayah sekitar khususnya wilayah strategis Petanglong (Kota Pekalongan – Kabupaten Batang – Kabupaten Pekalongan). Dalam pembangunan wilayahnya, pusat sarana tingkat kabupaten berada pada Kecamatan Kajen (yang terletak berada pada *centre* Kabupaten Pekalongan). Dengan demikian arah pengembangan dan pembangunan tidak hanya berpusat pada wilayah utara Kabupaten Pekalongan (karena berbatasan dengan Kota Pekalongan), namun juga berkembang ke arah selatan. Kondisi aksesibilitas Kabupaten Pekalongan berkembang mengikuti pusat aktivitas perkotaan, sehingga di Kecamatan Kajen terdapat pengembangan *exit tol*.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2031

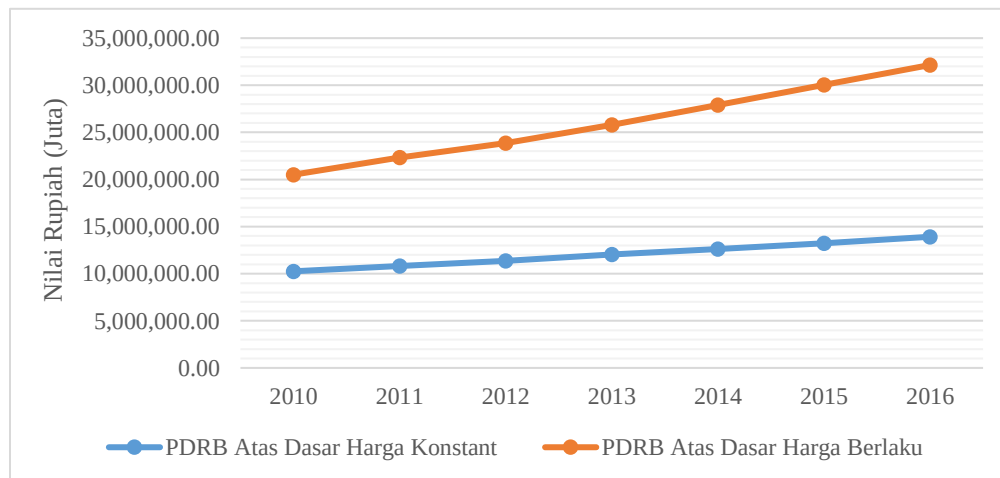
Peta III. 6 Sistem Jaringan Kabupaten Pekalongan

3.2.5 Sistem Ekonomi Wilayah

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, dimana kegiatan tersebut dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Perekonomian adalah sistem, manajemen sumber daya, dan pilihan kebijakan yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi suatu daerah untuk mengalokasikan sumber daya dalam menjalankan pemerintahan.

3.2.5.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB yang disajikan secara berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional. Melalui analisis PDRB maka dapat dilihat kemakmuran perekonomian di suatu wilayah, struktur ekonomi, dan pendapatan perkapita yang terdapat di wilayah tersebut. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun).



Gambar 3. 3
Grafik PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Baku

Selama lima tahun terakhir (2013- 2017) struktur perekonomian Kabupaten Pekalongan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Jasa Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pekalongan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pekalongan pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 31,15 persen (angka ini meningkat dari 30,88 persen di tahun 2013). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 17,65 persen (turun dari 19,90 persen di tahun 2013), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 13,46 persen (turun dari 14,38 persen di tahun 2013). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 6,64 persen (naik dari 6,10 persen di tahun 2013) dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 6,24 persen.

Tabel III. 6
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.64	0.46	1.49	-1.38	3.01	1.99
B. Pertambangan dan Penggalan	3.54	4.57	5.00	6.16	5.44	6.98
C. Industri Pengolahan	7.93	8.48	10.49	7.02	5.24	4.29
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.99	11.49	7.35	0.83	0.61	6.11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.08	-6.27	-3.09	4.00	2.46	2.16
F. Konstruksi	1.38	3.97	3.79	4.50	3.88	8.99
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasai Mobil dan Sepeda Motor	8.39	1.52	4.00	2.93	3.80	6.37
H. Transportasi dan Pergudangan	3.82	6.34	9.09	9.38	5.90	6.00
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.74	3.86	2.01	5.69	5.47	7.04
J. Informasi dan Komunikasi	8.80	9.15	8.93	15.86	11.81	8.81
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.71	1.93	3.34	5.45	5.00	8.81
L. Real Estate	6.16	4.40	7.04	6.60	6.49	7.78

M, N. Jasa Perusahaan	11.28	5.89	15.18	11.12	8.03	7.94
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.55	0.17	1.92	-0.42	5.06	4.91
P. Jasa Pendidikan	21.63	19.45	8.77	12.50	6.18	3.99
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13.01	11.54	7.48	14.37	5.16	9.05
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1.93	-1.35	10.07	9.00	4.07	6.46
PDRB	5.66	4.81	5.99	4.95	4.78	5.16

Sumber : Data DPMPTSP Provinsi Jateng, 2018

3.2.5.2 Kegiatan Ekonomi Wilayah

Nilai-nilai sector tiap wilayah bergantung pada kemajuan sector sebagai penentu potensi dari suatu wilayah tersebut. Investasi merupakan usaha investor untuk mendapatkan hasil yang akan dikonsumsi di masa depan. Investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang tinggi tentunya akan memberikan resiko yang tinggi pula. Nilai investasi ekonomi wilayah strategis Kota Pekalongan mengacu pada nilai investasi tingkat Provinsi. Adapun nilai tiap-tiap sector investasi sebagai kegiatan ekonomi wilayah sebagai berikut,

Tabel III. 7
Sektor-Sektor Investasi Provinsi Jawa Tengah dalam Nilai Rupiah

No.	SEKTOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Tw I-III
1	Listrik, Gas dan Air	10,111,723.80	6,544,545.70	4,133,645.20		686,586.60	4,915,782.20
2	Industri Tekstil	773,155.30	1,265,344.10	1,970,388.80	1,492,184.60	4,006,851.90	2,260,584.20
3	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	475,880.20			11,439,712.10		
4	Perdagangan dan Reparasi	255,088.90					
5	Industri Makanan	215,362.60	1,962,990.50	2,156,551.90	2,695,178.90	2,650,454.60	
6	Industri Mineral Non Logam		3,139,259.00	5,450,508.50	1,829,048.60		
7	Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik		168,768.70				
8	Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan			760,159.70			
9	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi				3,516,399.70	6,666,709.90	1,466,240.00

No.	SEKTOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Tw I-III
10	Jasa Lainnya					1,383,638.20	
11	Konstruksi						6,976,021.20
12	Pertambangan						867,394.30
	Lainnya	762,438.20	520,675.60	939,460.50	3,097,828.70	4,471,771.30	3,993,736.50
	Jumlah	12,593,649.00	13,601,583.60	15,410,714.60	24,070,352.60	19,866,012.50	20,479,758.40

Sumber : Data DPMPTSP Provinsi, 2018

Berdasarkan tabel III.7 ke-12 sektor atau jenis investasi yang ada di Kabupaten Pekalongan setiap tahunnya memiliki nilai yang berbeda. Dari kedua belas sector yang didapatkan berdasarkan pemerataan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan memiliki sector investasi yang berbeda tiap tahunnya, namun pada tahun 2018 secara aktif terdapat tujuh macam sector yang melakukan kegiatan investasi pada Kabupaten Pekalongan. Nilai investasi berdasarkan banyaknya proyek pada Kabupaten Pekalongan memiliki peningkatan nilai investasi, dengan peningkatan sebesar Rp 20,479,758.40 (Juta) namun proses dalam kegiatan proyek mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat peningkatan investasi di Kabupaten Pekalongan dengan menyerap 4.405 jiwa penduduk sebagai tenaga kerja kegiatan tersebut. Secara keseluruhan dari sector investasi yang ada hingga saat ini, jenis konstruksi tergolong berkembang pesat di Kabupaten Pekalongan. Konstruksi yang ada di Kabupaten Pekalongan berkembang mengikuti pembangunan jalan tol Semarang-Pekalongan, yang saat ini Kabupaten Pekalongan memiliki dua *exit tol* (hingga saat ini terdapat konstruksi *exit tol* di Kecamatan Kaje).